



**WALIKOTA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 350 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017 - 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 350 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama, maka perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penetapan kinerja;
- d. pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. pelaporan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 350 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017–2022 DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2022**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	Angka kemiskinan BPS	Angka kemiskinan dari BPS
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	$[60\% \text{Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung} + \{40\%(\text{Persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan} + \text{persentase anak yang tidak mengalami kekerasan})/2\}] * 100$	Indeks keberdayaan masyarakat didapatkan dari prosentase yang diperoleh dari penjumlahan Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung, penjumlahan Persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan dan persentase anak yang tidak mengalami kekerasan.
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	pola pangan harapan	skor pola pangan harapan	Pola pangan harapan dihitung dari komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu/tahun tertentu.
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	angka gini ratio (hasil perhitungan BPS)	Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) didapatkan dari publikasi BPS
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	$\frac{PDRB\ ADHK\ 2010_n - PDRB\ ADHK\ 2010_{n-1}}{PDRB\ ADHK\ 2010_{n-1}} \times 100\%$	Angka Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan prosentase PDRB ADHK 2010 tahun n, PDRB ADHK 2010 tahun n-1 dan PDRB ADHK 2010 tahun n-1
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas menurut BPS	Angka Kriminalitas diambil dari BPS
		Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	Jumlah pelanggaran perda adalah jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan/atau dipantau
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	$RLS = \frac{\text{Jumlah Lama Sekolah Penduduk Usia 25th Kentas}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 25th Kentas}}$	Angka Rata-rata Lama Sekolah dari BPS
		Angka harapan lama sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t Jumlah penduduk usia j yang bersekolah pada tahun t P_i^t Jumlah penduduk usia j pada tahun t i Usia (a, a + 1, ..., n) FK Faktor koreksi pesantren	Angka Harapan Lama Sekolah dari BPS
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	Angka kematian menurut umur	Angka harapan hidup dari BPS
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	Jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif dibagi jumlah rintisan kelurahan budaya x 100 %	Data rintisan kelurahan budaya yang aktif
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW / luas wilayah Kota Yogyakarta	Luas wilayah yang sesuai peruntukan dalam RTRW dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta
11	kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	30% IKU + 30% IKA + 40% ITV	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dari komponen Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Vegetasi (persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta).

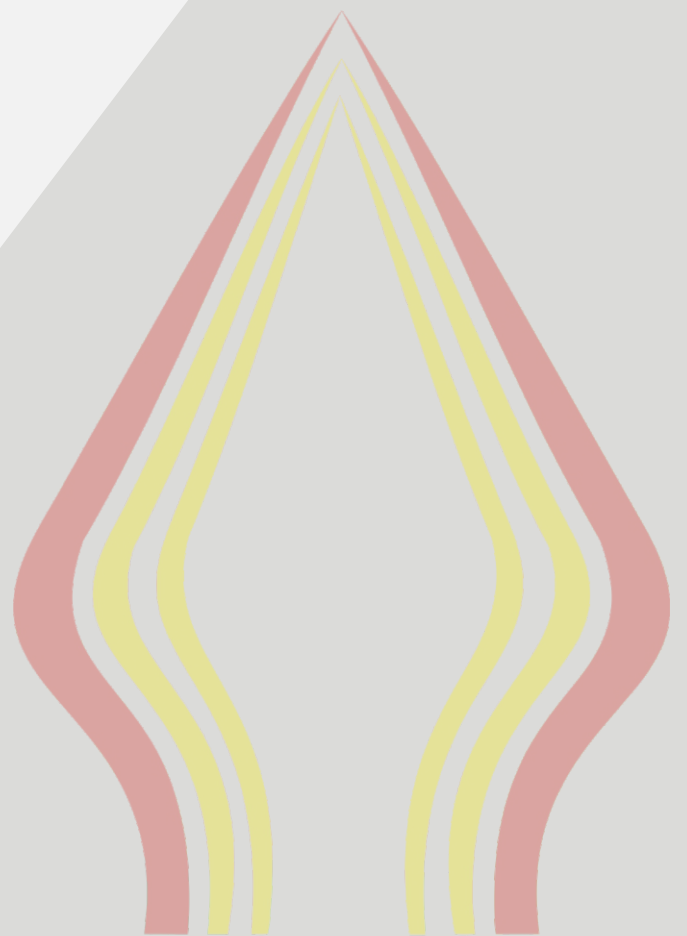
No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	$[40\% \times [70\% \{ \text{Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} \} + 30\% \{ \text{Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman} \}] + [20\% \{ 50\% \text{ pengurangan sampah} + 50\% \text{ pengangkutan sampah} \}] + 30\% \text{Level of Service} + [10\% \{ \text{Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana} + \text{Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran} \} / 2]$	Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, Level Of Service, Kampung Tangguh Bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time.
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat DIY atas Implementasi SAKIP
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30%Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30%Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20%persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	(1) Hasil operasi penegakan Perda baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat. (2) Jumlah penanganan event; pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (3) Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil anggota PolPP yang memahami peraturan dan yang lulus kesamaptaan. (4) Jumlah kampung yang memiliki anggota linmas, pembentukan dan penumbuhan kampung panca tertib.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30%Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30%Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20%persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	(1) Hasil operasi penegakan Perda baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat. (2) Jumlah penanganan event; pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (3) Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil anggota PolPP yang memahami peraturan dan yang lulus kesamaptaan. (4) Jumlah kampung yang memiliki anggota linmas, pembentukan dan penumbuhan kampung panca tertib.



SEGORO AMARTO

KEDISIPLINAN
KEPEDULIAN SOSIAL
GOTONG ROYONG
KEMANDIRIAN